

NOTULENSI

FGD REVIEW DAN PENYEMPURNAAN RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI PEMANFAATAN RUANG JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015

Hotel Grand Kemang, Kamis, 20 Agustus 2015

Pimpinan Rapat : Ibu Reny Windyawati, S.T., M.Sc. (Plt. Koordinator Direktorat Pemanfaatan Ruang)

Narasumber : Bapak Oswar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan BAPPENAS)

Peserta Rapat : Kementerian ATR, Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian PU-Pera, PLN, dan Konsultan.

SESI 1

Ibu Reny Windyawati

- Acara FGD ini dilaksanakan di Jakarta dan dibuka oleh Ibu Reny Windyawati. FGD ini bertujuan untuk menyampaikan program, kebijakan, dan arahan pengembangan terkait infrastruktur dari setiap sektor.
- Latar belakang dari kegiatan review dan penyempurnaan ini adalah diamanatkannya sinkronisasi program sektor dan kewilayahan dipusat/dan daerah secara terpadu dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah.
- Sedangkan tujuan dari review dan penyempurnaan ini adalah sebagai berikut:
 1. Medorong terciptanya kesamaan cara pandang dalam menyusun program terkait penyediaan infrastruktur dasar pengembangan wilayah
 2. Fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong pembangunan infrastrukturnya.
 3. Sinergisnya program pembangunan infrastruktur antar kementerian/ lembaga terkait dengan pemerintah daerah
- Pada RPI2JM sebelumnya sektor yang direncanakan hanya sektor infrastruktur ke-PU-an, sedangkan tahun 2015 ini direview dan akan ditambahkan sektor infrastruktur non ke-PU-an (perhubungan, telekomunikasi, dan ESDM). RPI2JM tidak hanya merencanakan infrastruktur saja tetapi juga pola ruangnya.
- Prinsip dalam penyusunan RPI2JM: kewilayahan, keterpaduan, keberlanjutan, koordinasi, dan optimalisasi SDA.
- Ada 5 langkah utama tahapan penyusunan RPI2JM yaitu:
 1. Arahan spasial (menentukan wilayah mana yg harus didorong dan dikendalikan pengembangannya)
 2. Perumusan rencana terpadu (merumuskan rencana terpadu dari analisa-analisa yang telah dibuat)

3. Sinkronisasi dan keterpaduan program (diharapkan program-program yang diusulkan sektor-sektor saling sinkron)
4. Penyiapan rancangan RPI2JM
5. Penyepakatan rancangan RPI2JM (apabila sudah disepakati, sektor juga harus bisa memasukkannya dalam rencana kerjanya).

Bapak Oswar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas)

- Masalah utama yang sering dihadapi adalah ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan yang terkadang menyebabkan beberapa rencana sulit untuk diimplementasikan. Untuk memperbaiki masalah tersebut Kementerian ATR berupaya agar rencana didalam RPJM dimasukkan kedalam RTRW. Sering terjadi periode RPJMD tidak sama dengan RTRW sehingga tidak bisa terlaksana karena APBD tidak dapat dianggarkan. Selain itu masalah komitmen antara K/L perlu diperbaiki agar rencana-rencana tersebut dapat diimplementasikan dan saling sinkron.
- Didalam RPJMN berisi agenda Pembangunan Nasional (Buku I), Agenda Pembangunan Bidang (Buku II), dan Agenda Pembangunan Wilayah (Buku III). Dan di dalam Buku III berisi rencana infrastruktur dan pembangunan kawasan strategis kepulauan.
- Didalam buku III juga terdapat rencana tata ruang yang jelas dimana lokasinya. Buku III ini bisa disebut revisi/peninjauan kembali RTR pulau selain itu juga lebih update. KSN juga sudah masuk di buku III sehingga buku III bisa menjadi panduan dalam menyusun RPI2JM. Persyaratan yang perlu dipenuhi agar rencana dapat terlaksana adalah peninjauan kembali RTRW yang ada.

Diskusi Sesi 1

No	Pertanyaan/Tanggapan	Jawaban
1	<p>Bapak Medi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana mengenai aspek pertahanan dan keamanan khususnya di wilayah perbatasan? • Bagaimana menentukan breakdown waktu serta indikator prioritas rencana dalam 5 tahun mendatang ? • Kebijakan dari agenda nawacita adalah membangun dari wilayah pinggiran (bottom-up) sementara itu RTR pulau secara top-down. Bagaimana cara menyesuaikan struktur ruangnya? 	<p>Bapak Oswar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku III sudah mengadopsi rencana tata ruang yang sudah ada dan didalamnya juga terdapat kegiatan-kegiatan di perbatasan. Kelemahan dalam buku III ada yang detil dan tidak detil/tidak seragam. Buku I - III dapat di download di Website Bappenas. • RPJMN adalah acuan untuk K/L. Prioritas akan ditentukan masing K/L, sehingga sangat penting untuk berkomunikasi dengan K/L terkait. • Rencana tata ruang yang bagus seharusnya disusun secara bottom up. Kemudian baru ditampilkan pusat-pusatnya. Hanya saja kondisi saat ini yang lebih dilihat adalah pusat-pusat. Pemerintah mengharapkan tidak hanya pusat-pusat saja yang diperhatikan, tetapi juga pedesaannya karena pedesaan juga penting, urbanisasi menjadi faktor

		<p>push. Perlu mendorong pedesaan untuk menyusun rencana tata ruang yang sederhana agar tidak terjadi perubahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebenarnya sinkron, hanya saja tidak dijelaskan secara urut. • Kekuatan rencana tata ruang adalah pengendalian. Rencana yang bagus saja tidak cukup, tetapi juga perlu melibatkan masyarakat sehingga tahu persis hal-hal apa yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pada RPJMN juga mendorong pembentukan forum-forum.
2	<p>Bapak Mursal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa tolok ukur yang riil sebagai acuan dalam menyusun RPI2JM? • Di Perpres KSN Maminasata sudah ada kelembagaan, apa ini yang dimaksud kelembagaan dalam muatan RPJMN yang baru? Terkait regulasi ingin dijelaskan lebih detail. 	<p>Bapak Oswar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada dua hal baru yang dimasukkan dalam RPJMN, yaitu regulasi (regulasi memastikan program agar bisa dijalankan), dan kelembagaan (ada rencana, tetapi tidak ada lembaga yang menjalankan maka akan sulit untuk diimplementasikan). • Ada beberapa regulasi yang sudah dicantumkan secara jelas di RPJMN. Regulasi diperlukan untuk memastikan terlaksananya rencana. RPJMN juga mendorong adanya kelembagaan di tiap KSN.
3	<p>Ibu Saraswati</p> <p>Di dalam paradigma baru ada infrastruktur baru yang ditambahkan. Bagaimana cara mendorong K/L untuk berkomitmen terhadap review dan penyempurnaan yang kita buat karena mereka juga prioritas sendiri?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum penyusunan harus ada komitmen bahwa RPI2JM adalah kepentingan bersama. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mendapatkan komitmen dari tiap K/L sehingga matriks ini menjadi kesepakatan bersama bukan hanya matriksnya Kementerian ATR.
4	<p>Bapak Agus</p> <p>Apakah pada RPJMN sudah memperhitungkan sistem cluster2 (WPS) yang ada di rencana tata ruang, karena hal tersebut juga menjadi pertimbangan kajian kami?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • WPS belum ada di RPJMN. RPJMN pada dasarnya adalah penerjemahan dari Buku III, tetapi ketika RPJMN ingin dilaksanakan maka perlu mereview RTRWnnya, sederhananya seperti itu.

SESI 2

Sesi 2 dibuka oleh Bapak Dwi. Pemaparan pertama dimulai oleh perwakilan dari Kemenhub dan dilanjutkan oleh Kementerian ESDM.

Bapak Yogi Nugraha (Biro Perencanaan Kemenhub)

CP: Handoyo Kemenhub 08561774460

Arah kebijakan strategi kerangka regulasi Kemenhub diturunkan dari sasaran pembangunan nasional RPJMN 2015-2019. Pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kemenhub adalah: pertimbangan lingkungan strategis, mandat RPJPN, RPJP Dephub ke RPJMN, peraturan menteri, dokumen perencanaan, UU transportasi, visi dan misi presiden, agenda rpjmn transportasi, tupoksi kemenhub, dll. Saat ini sudah membuat rancangan kerangka kelembagaan unit kerja pengembangan multimoda. Strategi untuk daerah perbatasan dilakukan subsidi operasional angkutan perintis. Saat ini juga sudah dilakukan sinkronisasi renstra dengan RP2JM (selengkapnya lihat pada ppt pemaparan Kemenhub).

Bapak Susetyo Edi Wibowo (Biro Perencanaan ESDM)

CP: 081281109676

Kementerian ESDM ruang lingkupnya adalah pengelolaan energi dan sumberdaya gas dan mineral sehingga bisa dimanfaatkan sektor transportasi, dll. Atap dari program pendukung visi dan misi presiden terpilih adalah membangun kedaulatan energi dan sumberdaya mineral yang dasarnya adalah nawacita. Program strategisnya adalah dengan pembangunan infrastruktur migas, dan untuk mengatasi krisis listrik dengan program 35.000 MW dengan menambah pembangkit listrik, gardu listrik dan transmisinya. Permasalahan yang terkait dengan tata ruang adalah penyediaan lahan (memberlakukan UU No. 2 tahun 2012), pengurusan izin (pelayanan terpadu satu pintu), koordinasi lintas sektor (membentuk tim nasional). Isu pemanfaatan ruang dari pembelajaran progres FTP 1 dan FTP 2 adalah: pembebasan lahan, negosiasi harga ipp dan pln, penunjukan dan pemilihan ipp, perizinan, koordinasi antar sektor. (selengkapnya lihat pada ppt pemaparan Kementerian ESDM)

Diskusi Sesi 2

No	Pertanyaan/Tanggapan	Jawaban
1	Bapak Syai'in (Divisi Perencanaan PLN) CP: 0811437277 Saat ini sudah ada rencana penambahan pembangkit kerjasama dengan swasta yang lokasinya masih indikatif. Permasalahannya tidak semua lokasi cocok untuk PLTU walaupun ada lahan yang luas, kalau bisa juga tidak jauh dari bebannya	

	<p>sehingga tidak terlalu tinggi costnya. Lokasi belum bisa ditentukan karena harus survey dulu. Ada investor juga yang ingin mendirikan kawasan industri di kawasan yang sudah diplotkan tersebut.</p>	
2	<p>Bapak Medi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kemenhub, kebanyakan KSN perbatasan adalah pulau-pulau terluar. Bagaimana strategi untuk wilayah perbatasan tadi? Bagaimana memprioritaskan program per tahunnya? • Untuk Kementerian ESDM, adakah informasi potensi energi di wilayah perbatasan? Bagaimana memberikan layanan listrik dan energi agar pulau-pulau terluar agar wilayah tersebut bisa tumbuh? 	<p>Bapak Susetyo Edi Wibowo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat banyak potensi energi dan mineral dikawasan perbatasan seperti ambalat, natuna, dll dan data-datanya juga sudah ada. <p>Bapak Yoga Nugroho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada detailnya, pulau-pulau perbatasan juga menjadi sasaran kami. Setelah kami petakan pembangunan-pembangunan dermaga/ bandara masih belum memiliki rencana induk sehingga sekarang sedang fokus untuk membuat rencana induk. Ibu bisa mendapatkan datanya ke Bappenas. Untuk Renstra ada yang subsektor (kereta api, pelabuhan,dll) akan tetapi lokasi di renstra belum detil.
3	<p>Ibu Nining</p> <p>Di dalam RPJMN sudah ada program dan isu strategis, kami dalam menyusun RPI2JM membutuhkan lokasi yang jelas, bagaimana cara mendapatkannya? Kemudian untuk Renstra, bagaimana juga cara mendapatkannya?</p>	<p>Bapak Susetyo Edi Wibowo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Ibu nining data-data yang diperlukan bisa diperoleh ke Biro Perencanaan Kementerian ESDM.
4	<p>Bapak Mursal</p> <p>Hal-hal apa yang menjadi persoalan mendesak dan terkait pemanfaatan ruang diluar biaya?</p>	
5	<p>Ibu ken (kalimantan dan sulawesi)</p> <p>Untuk Bapak Edi, sektor energi ada program strategis akan tetapi tidak ada lokasinya sehingga bagaimana cara untuk memperoleh lokasinya? Apakah ada keterkaitan antara Kementerian Perhubungan dengan bina marga?</p>	<p>Bapak Yoga Nugroho</p> <p>Sudah ada pembangunan jaringan kereta api untuk batu bara di kalimantan, hampir diseluruh provinsi dan angkutan ke batas negara didaerah sulawesi juga sudah dikembangkan. Hal-hal tersebut bisa dimasukkan di RPI2JM. Selain itu Program kegiatan kawasan perbatasan untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan juga bisa dilihat rencananya.</p>
6	<p>Bapak tyas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salah satu program nawacita adalah untuk mengembangkan 	<p>Bapak Susetyo Edi Wibowo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi untuk mengatasinya dengan cara memberi listrik dan akses energi di wilayah perbatasan. Untuk

	<p>kawasan perbatasan lalu program apa yang akan dikembangkan diwilayah tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Kementerian ESDM, di wilayah pintu masuk kalimantan, listrik masih menyewa sehingga bagaimana strategi untuk mengatasinya? Jenis pembangkit apa yang akan dikembangkan? Dan Kapasitasnya seperti apa? Serta strategi ramah lingkungan apa yang akan dikembangkan diwilayah perbatasan? 	<p>mengimplementasikanya, ditahun 2015 sedang dibangun 50 titik PLTG di kawasan terpencil dan pulau-pulau terluar. Strategi lainnya dengan dana DAK akan dibangun beberapa pembangkit listrik tenaga EGT seperti biogas, biomass, PLTH, PLTS dan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk sumber tambang dan mineral pemerintah sedang membuat kebijakan untuk membuat nilai tambah sehingga sumberdaya tersebut tidak keluar sebagai raw material.
--	--	---